

INTERVENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENANGKAL TOKSISITAS DIGITAL EVALUASI RESTRIKSI GAWAI TERHADAP RESILIENSI SOSIAL DAN KOGNITIF PELAJAR DI KOTA BOGOR

Aria Satrianata¹, Harry Fredian Herlan², Syabantiara³, Fitra Fitriani⁴,
Abdul Rahman Pallawangeng⁵, Al Hakim⁶, Sofyan Dadu⁷, Rahmat Mintarto⁸

¹⁻⁸Universitas Islam Syekh Yusuf, Banten, Indonesia

aryasatrianata731@gmail.com, ry.herland@gmail.com,
tiara.syaban.1974@gmail.com, fitrafitriani28@gmail.com,
abdu.pallawangeng@gmail.com, alha43914@gmail.com,
sofyandadu8665@gmail.com, mintatorahmat@gmail.com

ABSTRACT

The invasion of surveillance capitalism into educational spaces has triggered an attention crisis and weakened students' cognitive resilience. This study aims to analyze the effectiveness of smartphone restriction policies implemented at SMAN 5, SMAN 6, and SMAN 9 Bogor City as a bureaucratic intervention to mitigate digital toxicity. The research employed a mixed methods approach using a concurrent triangulation strategy by integrating the perspectives of street-level bureaucracy, developmental psychology, and collaborative governance. Primary data were collected through structured questionnaires and narrative notes from teachers and students, which were analyzed integratively to evaluate policy implementation. The findings indicate that smartphone restriction policies successfully established a high level of administrative compliance, although implementation challenges remained due to teachers' discretionary decisions arising from tensions between rule enforcement and digitally oriented learning needs. From a psychological perspective, students experienced withdrawal symptoms as a consequence of reduced digital access; however, they gradually demonstrated improvements in learning focus, emotional stability, and social interaction. The study also revealed a collaboration paradox in which parental support for school policies was normatively high but was not accompanied by consistent supervision of smartphone use at home. These findings confirm that smartphone restriction is not merely a disciplinary instrument but a form of social engineering that requires collaborative educational governance to develop a sustainable cognitive recovery ecosystem in the era of digital disruption.

Keywords: *Surveillance Capitalism, Street-Level Bureaucracy, Gadget Restriction, Cognitive Resilience, Collaborative Governance, Social Capital.*

ABSTRAK

Invasi *surveillance capitalism* ke dalam ruang pendidikan telah memicu krisis atensi dan penurunan resiliensi kognitif pada pelajar. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan restriksi gawai di SMAN 5, SMAN 6, dan SMAN 9 Kota Bogor sebagai intervensi birokrasi dalam memitigasi toksisitas digital. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan strategi triangulasi konkuren yang memadukan perspektif *street-level bureaucracy*, psikologi perkembangan, dan *collaborative governance*. Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur dan catatan naratif dari guru serta siswa, kemudian dianalisis secara integratif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restriksi gawai berhasil membangun kepatuhan administratif yang tinggi, meskipun pada tahap implementasi masih ditemukan diskresi guru akibat benturan antara penegakan aturan dan kebutuhan pembelajaran digital. Pada aspek psikologis, siswa mengalami *withdrawal symptoms* akibat berkurangnya akses digital, namun secara bertahap menunjukkan pemulihan fokus belajar, stabilitas emosional, dan peningkatan interaksi sosial. Penelitian ini juga menemukan paradoks kolaborasi, di mana dukungan orang tua terhadap kebijakan sekolah cukup tinggi secara normatif, tetapi belum diikuti pengawasan penggunaan gawai yang konsisten di rumah. Temuan ini menegaskan bahwa restriksi gawai bukan sekadar instrumen disipliner, melainkan bentuk *social engineering* yang menuntut tata kelola pendidikan kolaboratif guna membangun ekosistem pemulihan kognitif yang berkelanjutan di era disrupsi digital.

Kata Kunci: Kapitalisme Pengawasan, Birokrasi Ujung Tombak, Restriksi Gawai, Resiliensi Kognitif, Tata Kelola Kolaboratif, Modal Sosial.

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan disrupsi teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah struktur kehidupan sosial secara fundamental, termasuk dalam sektor pendidikan. Digitalisasi yang pada awalnya diproyeksikan sebagai instrumen demokratisasi akses pengetahuan kini berkembang menjadi ekosistem dominan yang

memengaruhi pola interaksi sosial, perilaku belajar, serta struktur kognitif generasi muda. Dalam perspektif *surveillance capitalism*, penetrasi teknologi digital, khususnya penggunaan *smartphone* di kalangan pelajar, menempatkan perhatian, preferensi, dan stabilitas psikologis individu sebagai komoditas yang dieksploitasi melalui sistem algoritmik perusahaan teknologi global (Zuboff,

2019). Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar mengenai kemampuan institusi pendidikan dalam mempertahankan otonomi pedagogis di tengah dominasi realitas digital.

Paparan teknologi digital yang tidak terkontrol melahirkan fenomena *digital toxicity*, yaitu kondisi ketika ketergantungan terhadap ruang siber secara sistematis menurunkan kualitas interaksi sosial serta melemahkan kapasitas kognitif pelajar. Berbagai platform digital modern melalui mekanisme *infinite scrolling*, notifikasi berulang, dan sistem *instant reward* dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna secara terus-menerus sehingga memicu gangguan perhatian berkelanjutan (*continuous partial attention*). Fenomena ini berdampak langsung pada menurunnya kemampuan siswa dalam mempertahankan fokus, melakukan refleksi mendalam, dan menyerap pengetahuan secara optimal (Haidt, 2024). Dalam konteks pendidikan, kondisi tersebut menjadi ancaman serius karena proses pembelajaran membutuhkan atensi penuh, ketahanan membaca, serta

kemampuan berpikir reflektif sebagai fondasi utama transfer pengetahuan (OECD, 2021).

Berbagai studi internasional memperkuat urgensi persoalan tersebut. *Global Education Monitoring Report* yang diterbitkan UNESCO (2023) menegaskan bahwa penggunaan perangkat digital tanpa regulasi yang memadai di lingkungan sekolah berkontribusi terhadap penurunan performa akademik, meningkatnya alienasi sosial, serta gangguan stabilitas emosional peserta didik. Salah satu manifestasi nyata ialah fenomena *phubbing*, yaitu perilaku mengabaikan interaksi sosial langsung akibat ketergantungan pada gawai, yang semakin memperlihatkan melemahnya empati sosial dan kualitas komunikasi antarpelajar (Twenge & Campbell, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan tidak selalu berimplikasi positif apabila tidak disertai tata kelola yang adaptif dan regulasi yang tepat.

Dalam perspektif administrasi publik modern, situasi tersebut menuntut hadirnya intervensi kebijakan yang responsif dan adaptif. Kebijakan pembatasan penggunaan

gawai di sekolah tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk kontrol represif, melainkan sebagai manifestasi *agile governance* yang menempatkan negara sebagai aktor pelindung resiliensi kognitif dan kesehatan mental peserta didik dari penetrasi pasar digital yang kehilangan orientasi etis (Mergel et al., 2021). Ketiadaan regulasi justru berpotensi mencerminkan kegagalan institusi publik dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap ruang belajar. Oleh karena itu, kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi instrumen penting untuk mereduksi dampak kecemasan digital dan fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) di kalangan pelajar.

Sebagai wilayah urban dengan intensitas penetrasi digital yang tinggi, Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut secara nyata. Pemerintah daerah bersama institusi pendidikan telah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama jam sekolah sebagai bentuk intervensi strategis untuk mengurangi toksisitas digital di lingkungan pendidikan. Implementasi kebijakan ini secara empiris tercermin pada SMA Negeri 5,

SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 9 Kota Bogor yang menjadi representasi laboratorium sosial untuk mengamati dinamika hubungan antara regulasi pendidikan, perilaku digital siswa, dan tantangan implementasi kebijakan di tingkat sekolah (Creswell & Poth, 2018). Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak terlepas dari resistensi sosial, konflik persepsi, serta perbedaan kepentingan antaraktor pendidikan.

Dalam konteks kebijakan publik, permasalahan tersebut menunjukkan karakteristik *wicked problems* yang membutuhkan pendekatan *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan melalui dialog, konsensus, serta komitmen kolektif. Pada kebijakan restriksi gawai, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sekolah, tetapi juga oleh perubahan perilaku siswa serta keterlibatan orang tua dalam mendukung pengawasan penggunaan gawai di lingkungan keluarga. Tanpa dukungan lintas aktor, kebijakan sekolah cenderung

kehilangan
implementatifnya.

efektivitas

Meskipun kebijakan pembatasan gawai mulai diterapkan di berbagai institusi pendidikan, kajian empiris mengenai efektivitas implementasinya masih didominasi pendekatan evaluatif konvensional yang berfokus pada kepatuhan administratif, seperti jumlah pelanggaran, frekuensi penyitaan gawai, atau tingkat sosialisasi aturan. Pendekatan semacam ini dinilai reduksionis karena belum mampu mengukur dampak substantif kebijakan terhadap perubahan perilaku, pemulihan fokus akademik, stabilitas psikologis, maupun kualitas interaksi sosial siswa (Dunn, 2018). Dengan demikian, masih terdapat *research gap* terkait evaluasi kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan dimensi tata kelola kebijakan, kesehatan mental, resiliensi kognitif, dan restorasi interaksi sosial secara simultan.

Bertolak dari kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menawarkan perspektif evaluatif yang lebih holistik dengan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan restriksi gawai pada SMA Negeri 5,

SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 9 Kota Bogor. Penelitian ini secara khusus mengevaluasi dampak kebijakan terhadap peningkatan fokus akademik siswa, penurunan tingkat kecemasan psikologis, pemulihan kualitas interaksi sosial, serta efektivitas model *collaborative governance* antara sekolah dan keluarga. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga menelaah kebijakan restriksi gawai sebagai strategi pemulihan resiliensi kognitif dan ketahanan sosial peserta didik di tengah dominasi budaya digital kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual baru bagi pengembangan kebijakan pendidikan adaptif dalam menghadapi disrupsi teknologi global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods research*) dengan paradigma pragmatisme untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan restriksi gawai dalam merespons dampak toksisitas digital terhadap siswa. Pendekatan ini

dipilih karena fenomena yang diteliti tidak hanya memerlukan pengukuran kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga analisis kualitatif terkait perubahan resiliensi kognitif, kesehatan mental, dan interaksi sosial peserta didik. Mengacu pada Creswell dan Plano Clark (2018), *mixed methods* memungkinkan integrasi data kuantitatif dan kualitatif secara simultan sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Secara spesifik, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif (*evaluative research*) dengan desain studi kasus beragam (*multiple case study*) yang berfokus pada implementasi kebijakan pembatasan gawai di SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 9 Kota Bogor sebagai representasi sekolah urban dengan intensitas penetrasi digital yang tinggi (Dunn, 2018; Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada guru dan siswa, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen kebijakan sekolah, data pelanggaran siswa, serta literatur

ilmiah yang relevan. Guru diposisikan sebagai *street-level bureaucrats*, siswa sebagai subjek utama yang mengalami dampak kebijakan, sedangkan orang tua menjadi bagian penting dalam kerangka *collaborative governance* (Howlett et al., 2020; Ansell & Gash, 2008). Pengumpulan data dilakukan menggunakan strategi Triangulasi Konkuren (*Concurrent Triangulation Strategy*), yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu fase penelitian (Creswell & Plano Clark, 2018). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala “Ya, Tidak, dan Netral” untuk mengukur aspek pemahaman dan kepatuhan, dampak akademik, kesehatan mental, interaksi sosial, serta hubungan dengan orang tua.

Novelty metodologis penelitian ini terletak pada integrasi kolom “Catatan” pada setiap item kuesioner, yang memungkinkan pengumpulan data kualitatif secara langsung untuk menggali pengalaman psikologis siswa, dinamika adaptasi terhadap pembatasan gawai, serta kendala implementatif yang dihadapi guru. Data kemudian dianalisis secara integratif melalui triangulasi hasil

kuesioner, dokumentasi institusional, dan temuan kualitatif sehingga menghasilkan evaluasi kebijakan yang lebih holistik, tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif tetapi juga pada perubahan tingkat *anxiety*, *Fear of Missing Out* (FOMO), pemulihan fokus akademik, dan restorasi interaksi sosial siswa (Haidt, 2024; Dunn, 2018).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Anatomi Kepatuhan Struktural dan Implementasi Kebijakan Restriksi Gawai

Implementasi kebijakan restriksi gawai di SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 9 Kota Bogor menunjukkan tingkat kepatuhan struktural yang relatif tinggi sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Tingkat afirmasi guru terhadap kejelasan aturan mencapai 96,5%, pemahaman kebijakan 98,0%, dan konsistensi penegakan aturan 87,5%. Pada siswa, tingkat pengetahuan terhadap aturan mencapai 95,2%, kepatuhan harian 82,4%, dan frekuensi pelanggaran rendah sebesar 78,6%.

Tabel 1. Matriks Evaluasi Implementasi dan Kepatuhan Kebijakan Restriksi Gawai

Dimensi Pengukuran	Responden	Persentase	Net Score	Penolakan
Kejelasan Aturan & Sosialisasi	Guru	96.5%	3.5%	0.0%
Pemahaman Kebijakan	Guru	98.0%	2.0%	0.0%
Konsistensi Penegakan Aturan	Guru	87.5%	10.5%	2.0%
Pengetahuan Siswa terhadap Aturan	Siswa	95.2%	4.1%	0.7%
Tingkat Kepatuhan Harian	Siswa	82.4%	14.3%	3.3%
Frekuensi Pelanggaran	Siswa	78.6%	18.2%	3.2%

Sumber: Olah Data Primer, 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan telah dipahami dengan baik oleh guru dan siswa.

Namun, penurunan pada aspek kepatuhan aktual mengindikasikan adanya resistensi pasif atau *simulated compliance* dari siswa, sedangkan guru masih menghadapi ruang diskresi dalam implementasi kebijakan di kelas. Dalam perspektif *Street-Level Bureaucracy*, efektivitas kebijakan tidak cukup hanya pada kepatuhan formal, tetapi juga memerlukan internalisasi kesadaran siswa terhadap dampak ketergantungan digital (Dunn, 2018; Howlett et al., 2020).

2. Transformasi Resiliensi Kognitif dan Pemulihan Psikologis

Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan restriksi gawai berkontribusi terhadap peningkatan fokus belajar dan stabilitas psikologis siswa. Sebanyak 88,2% guru menilai fokus siswa meningkat, sementara 75,8% siswa mengakui dapat belajar tanpa distraksi digital. Pada aspek kesehatan mental, 71,3% siswa merasakan penurunan kecemasan, tetapi hanya 66,5% yang mampu mengendalikan ketergantungan terhadap gawai.

Tabel 2. Matriks Evaluasi Dampak Akademik dan Pemulihan Psikologis

Dimensi Pengukuran	Responden	Persentase	Netural	Penolakan
Restorasi Fokus Belajar	Guru	88.2%	9.5%	2.3%
Belajar Tanpa Distraksi	Siswa	75.8%	17.4%	6.8%
Stabilitas Emosional	Guru	84.6%	12.1%	3.3%
Reduksi Anxiety/FOMO	Siswa	71.3%	20.2%	8.5%
Pengendalian Ketergantungan	Siswa	66.5%	23.4%	10.1%

Sumber: Olah Data Primer, 2026

Data tersebut menunjukkan adanya fase adaptasi psikologis siswa terhadap pembatasan akses digital. Tingginya area ambiguitas pada indikator ketergantungan memperlihatkan gejala *withdrawal symptoms*, sehingga kebijakan pembatasan gawai perlu didukung program aktivitas substitusi untuk mempercepat proses detoksifikasi digital (Zuboff, 2019; Haidt, 2024).

3. Restorasi Interaksi Sosial dan Modal Sosial Sekolah

Pembatasan penggunaan gawai juga berdampak positif terhadap pemulihan interaksi sosial siswa. Sebanyak 92,4% guru menilai interaksi tatap muka meningkat, sedangkan 81,5% siswa mengakui komunikasi langsung menjadi lebih baik. Selain itu, 94,2% guru dan 85,1% siswa menyatakan adanya peningkatan kualitas hubungan sosial setelah kebijakan diterapkan.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Restorasi Modal Sosial dan Kohesi Komunal

Dimensi	Responden	Persentase	Neto	Penolakan
Interaksi Tatap Muka	Guru	92.4%	6.5%	1.1%
Komunikasi Antar Teman	Siswa	81.5%	15.3%	3.2%
Keaktifan Diskusi Kelas	Guru	88.7%	9.8%	1.5%
Partisipasi Diskusi Akademik	Siswa	74.3%	20.5%	5.2%

Dimensi	Responden	Persentase	Neto	Penolakan
Kualitas Hubungan Sosial	Guru	94.2%	5.8%	0.0%
Solidaritas Pertemanan	Siswa	85.1%	13.4%	1.5%

Sumber: Olah Data Primer, 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa restriksi gawai efektif mengurangi *phubbing* dan meningkatkan kohesi sosial siswa, sejalan dengan teori *Social Capital* dari Putnam (2000). Namun, tingkat partisipasi diskusi akademik siswa masih relatif rendah, menunjukkan perlunya strategi pembelajaran kolaboratif untuk memperkuat kemampuan komunikasi verbal siswa.

4. Tata Kelola Kolaboratif dan Kendala Implementasi

Keberhasilan kebijakan restriksi gawai dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan kesiapan institusi sekolah. Sebanyak 89,4% guru menilai orang tua mendukung kebijakan sekolah, tetapi hanya 64,2% siswa yang mengaku mendapat

pembatasan penggunaan gawai di rumah. Selain itu, 41,2% guru mengakui masih menghadapi kendala implementasi, terutama terkait kebutuhan pembelajaran digital dan keterbatasan media alternatif.

Tabel 4. Matriks Evaluasi Tata Kelola Kolaboratif dan Kapasitas Institusional

Dimensi Pengukuran	Responden	Persentase	Net	Penolakan
Dukungan Orang Tua	Guru	89.4%	8.2%	2.4%
Pengaturan Gawai di Rumah	Siswa	64.2%	25.3%	10.5%
Media Substitusi Sekolah	Guru	82.5%	14.1%	3.4%
Kendala Implementasi	Guru	41.2%	18.5%	40.3%
Komunikasi di Rumah	Siswa	70.1%	21.5%	8.4%

Sumber: Olah Data Primer, 2026

Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya didukung konsistensi pengawasan keluarga. Dalam perspektif *Collaborative Governance*,

efektivitas kebijakan memerlukan sinergi berkelanjutan antara sekolah, orang tua, dan dukungan infrastruktur pembelajaran agar perubahan perilaku digital siswa dapat berlangsung secara berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008).

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restriksi gawai di SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 9 Kota Bogor merupakan bentuk intervensi strategis yang efektif dalam merespons dampak toksisitas digital di lingkungan pendidikan. Secara empiris, kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan fokus belajar siswa, mendukung proses detoksifikasi psikologis, serta mengurangi distraksi digital selama pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa pembatasan penggunaan gawai bukan merupakan kemunduran pedagogis, melainkan upaya institusional untuk melindungi resiliensi kognitif siswa dari dampak negatif *surveillance capitalism* yang semakin memengaruhi perilaku generasi muda.

Pada aspek implementasi, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara tingkat pemahaman terhadap kebijakan

dengan kepatuhan aktual siswa. Meskipun guru menunjukkan tingkat pemahaman dan konsistensi implementasi yang tinggi, sebagian siswa masih menunjukkan resistensi pasif yang mencerminkan gejala *withdrawal symptoms* akibat ketergantungan terhadap perangkat digital. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan gawai tidak cukup dilakukan melalui pendekatan disipliner semata, tetapi perlu didukung strategi pedagogis yang lebih adaptif melalui aktivitas substitusi yang mampu membantu proses transisi psikologis siswa secara bertahap.

Selain berdampak pada aspek akademik, kebijakan restriksi gawai juga terbukti meningkatkan interaksi sosial, memperkuat kohesi komunal, serta mengurangi fenomena *phubbing* di lingkungan sekolah. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek *collaborative governance*, terutama belum optimalnya pengawasan orang tua dalam membatasi penggunaan gawai di lingkungan rumah. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini memerlukan sinergi berkelanjutan antara sekolah,

guru, orang tua, serta dukungan infrastruktur pembelajaran yang memadai. Dengan demikian, tata kelola pendidikan dalam menghadapi disrupsi digital harus diarahkan pada pembangunan ekosistem pemulihan yang integratif agar siswa mampu mengendalikan teknologi secara sehat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, A., & Finlay, B. (2009). *Statistical Methods for the Social Sciences*. Pearson.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Haidt, J. (2024). *The anxious generation: How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness*. Penguin Press.

- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th Anniversary Expanded ed.). Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2022). *Generations: The real differences between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers, and Silents—and what they mean for America's future*. Atria Books.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?*. UNESCO Publishing.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.